

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang besar bagi perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Di Indonesia, upaya digitalisasi telah digalakkan melalui inisiatif Desa Digital yang bertujuan menciptakan pelayanan masyarakat yang modern, transparan, efisien, dan responsif. Program ini menjadi langkah nyata dalam mendukung transformasi digital di berbagai aspek pemerintahan desa, seperti administrasi, penyebaran informasi, dan pelayanan publik. Dalam era Revolusi Industri 4.0, sektor pemerintahan menjadi salah satu bidang yang terdampak signifikan. Menurut Hendriyaldi, 2022 Transformasi digital pada sektor pemerintahan bertujuan utama untuk meningkatkan kemudahan dan efisiensi dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat (Budiman, 2024). Pemerintah diharapkan mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Tren ini melahirkan konsep e-government, di mana teknologi digunakan untuk memperkuat interaksi antara pemerintah dan masyarakat melalui pelayanan publik berbasis elektronik.

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga meluncurkan Program 100 Smart Village sebagai upaya untuk mempercepat transformasi digital di desa-desa. Program ini bertujuan mengembangkan desa-desa cerdas melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan pemerintahan, pengembangan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya berbasis teknologi. Melalui program ini, desa-desa di Indonesia diharapkan tidak hanya memiliki infrastruktur digital, tetapi juga membangun masyarakat yang cerdas, pemerintahan yang terbuka, ekonomi berbasis inovasi, serta lingkungan yang berkelanjutan. Program 100 Smart Village menjadi bagian dari strategi nasional untuk mewujudkan pembangunan

desa yang modern, inklusif, dan berkelanjutan dalam menghadapi era Revolusi Industri 4.0.

Desa Sidomulyo, yang terletak di Kabupaten Jember, merupakan salah satu contoh desa yang mulai menerapkan konsep Desa Digital. Dengan potensi besar di sektor pertanian dan sumber daya manusia, desa ini menyadari pentingnya transformasi digital untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Melalui digitalisasi, Desa Sidomulyo berupaya untuk meningkatkan efisiensi dalam sistem administrasi, mempercepat penyebaran informasi, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Fenomena digitalisasi desa ini tidak hanya mencakup penggunaan aplikasi untuk pelayanan publik, tetapi juga mencakup perubahan dalam cara masyarakat berinteraksi dengan pemerintah. Dengan adanya aplikasi seperti MallDesa, warga desa dapat mengakses berbagai layanan administratif dan informasi publik dengan lebih mudah. Hal ini sejalan dengan tren global menuju e-Government, di mana pemerintah berusaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui penggunaan teknologi. Konsep ini selaras dengan tujuan e-Government Pemerintah Daerah Jember yang berfokus pada digitalisasi layanan publik untuk meningkatkan pelayanan dan memperkuat interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Implementasi digitalisasi di tingkat desa, seperti yang terjadi di Desa Sidomulyo, Kabupaten Jember, menjadi contoh konkret transformasi digital. Desa Sidomulyo, dengan potensi besar di bidang pertanian dan sumber daya manusia, mengembangkan inovasi berbasis teknologi seperti aplikasi MallDesa. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan administratif dan informasi publik. MallDesa juga mencakup konsep *Smart Village* untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, *Smart Citizen* untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya, dan *Smart Economy* untuk mendorong inovasi ekonomi berbasis teknologi. Dalam konteks Desa Sidomulyo, keberhasilan program Desa Digital tidak hanya bergantung pada penyediaan infrastruktur teknologi semata, tetapi juga pada kualitas *brainware* seperti operator Media Center, perangkat desa, dan masyarakat yang mengakses layanan berbasis digital. *Software* seperti aplikasi MallDesa, *hardware* berupa perangkat komputer dan server, serta jaringan internet sebagai komponen *networking* menjadi pilar utama dalam memastikan transformasi digital dapat berjalan dengan efektif. Kolaborasi

dan pengelolaan optimal dari keempat komponen ini sangat penting untuk mencapai efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa.

Dalam pengembangan program desa digital, *akuntabilitas* dan *transparansi* menjadi dua prinsip utama yang mendukung keberhasilan tata kelola desa berbasis teknologi. *Akuntabilitas* mencerminkan adanya tanggung jawab dari pemerintah desa dalam mengelola program dan memberikan laporan yang jelas serta terukur kepada masyarakat. Program desa digital, seperti pemanfaatan aplikasi *MallDesa* atau layanan digital lainnya, menuntut pengelolaan yang bertanggung jawab agar program dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Di sisi lain, *transparansi* berperan penting dalam memastikan keterbukaan informasi kepada masyarakat desa. Melalui implementasi teknologi, seperti aplikasi digital dan sistem informasi desa, masyarakat dapat mengakses data terkait kebijakan publik, dan pelayanan administrasi desa. Transparansi ini mendorong kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa serta memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Dengan adanya akuntabilitas dan transparansi, sinergi antara pemerintah desa, sektor swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan desa digital yang berkelanjutan dapat tercapai. Hal ini juga sejalan dengan prinsip *digital governance* yang menekankan pentingnya efisiensi, keterbukaan, dan partisipasi publik dalam pengelolaan pemerintahan berbasis teknologi.

Namun, meskipun potensi digitalisasi desa sangat besar, hambatan seperti kesenjangan digital dan keterbatasan infrastruktur masih menjadi tantangan. Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi landasan hukum yang mendukung implementasi digitalisasi di seluruh sektor pemerintahan, termasuk di tingkat desa. Perpres ini menetapkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib mengembangkan dan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pelayanan publik. Beberapa poin penting dari Perpres ini meliputi integrasi layanan, peningkatan kualitas pelayanan, penguatan akuntabilitas, dan pemberdayaan masyarakat. SPBE mendorong integrasi layanan

publik melalui penggunaan teknologi informasi, sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai layanan secara lebih mudah dan cepat. Dengan penerapan SPBE, diharapkan kualitas pelayanan publik dapat meningkat, termasuk dalam hal kecepatan, akurasi, dan transparansi informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Selain itu, SPBE juga bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat, dengan memanfaatkan data dan informasi yang terintegrasi. Digitalisasi diharapkan dapat memberdayakan masyarakat untuk lebih aktif dalam proses pemerintahan, termasuk dalam pengawasan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam era digital yang terus berkembang, transparansi dan efisiensi pelayanan publik menjadi kebutuhan mendesak, termasuk di tingkat desa.

Fenomena menarik dalam penerapan program Desa Digital di Desa Sidomulyo adalah keterlibatan berbagai aktor dalam mendukung keberhasilannya. Pemerintah desa, sektor swasta, dan masyarakat memainkan peran masing-masing, mulai dari penyediaan infrastruktur teknologi, pelatihan literasi digital, hingga pemanfaatan layanan berbasis teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Kolaborasi ini mencerminkan pentingnya sinergi multi-aktor dalam membangun desa digital yang berkelanjutan. Namun, meskipun program ini memiliki potensi besar, berbagai tantangan masih harus dihadapi, seperti kesenjangan digital, keterbatasan infrastruktur (akses internet terbatas), dan rendahnya literasi teknologi di kalangan masyarakat. Setiap Aktor memiliki peran tersendiri seperti, (1)Pemerintah Desa (Media Center), Keberadaan Media Center Desa membantu menciptakan keterbukaan informasi dan memastikan masyarakat dapat mengakses informasi yang relevan dengan cepat dan akurat. Selain itu, Media Center juga berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah desa dan warganya, memfasilitasi umpan balik dari masyarakat terkait kebijakan atau pelayanan desa. (2)Masyarakat, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), berperan dalam mendukung literasi digital warga desa, sehingga teknologi baru dapat diakses dan dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh kalangan masyarakat. (3)Pihak Swasta, berkontribusi melalui kolaborasi dalam penyediaan infrastruktur digital, pelatihan teknologi, dan pengembangan aplikasi seperti MallDesa, yang memungkinkan desa memiliki layanan digital yang terintegrasi. Sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan

aktor-aktor tersebut menjadikan Sidomulyo mampu menghadapi tantangan transformasi digital dengan lebih efektif. aplikasi Mall Desa memiliki tingkat efektivitas yang lebih baik dibandingkan sebelum adanya aplikasi ini. Hal ini dapat dilihat dari kemudahan dalam memilih fitur-fitur yang disediakan (Qadiri & Wicaksono, 2023).

Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 05 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Desa Sidomulyo merupakan langkah penting dalam mendukung transformasi digital yang terjadi di desa tersebut. Perdes ini mengatur secara rinci mengenai penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di tingkat desa, sesuai dengan arahan dari Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE yang lebih luas. Dalam Perdes Sidomulyo Nomor 05 Tahun 2022, ditetapkan berbagai ketentuan yang mengatur penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik di tingkat desa, termasuk penerapan aplikasi MallDesa sebagai sistem unggulan. Perdes ini tidak hanya mencakup penggunaan teknologi untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan administratif dan informasi publik, tetapi juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi pengelolaan sumber daya desa. Meskipun Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 05 Tahun 2022 tentang SPBE telah diterapkan untuk mendukung transformasi digital, pelaksanaannya menghadapi hambatan teknis dan sosial yang membutuhkan solusi kolaboratif antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak swasta. Peraturan ini juga menekankan pentingnya peran Media Center Desa, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), dan pihak swasta dalam mendukung digitalisasi desa. Melalui kolaborasi ini, diharapkan Desa Sidomulyo dapat terus mengembangkan infrastruktur digital, meningkatkan literasi digital masyarakat, serta memperkuat sinergi antar pihak terkait untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berbasis teknologi. Dengan adanya Perdes Sidomulyo Nomor 05 Tahun 2022, desa ini menegaskan komitmennya untuk melaksanakan e-Government yang transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penerapan digitalisasi di Desa Sidomulyo menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam mengimplementasikan program-program digital yang sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah dan nasional dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih modern.

Dalam implementasi Desa Digital di Desa Sidomulyo, Integratif *Digital governance* sangat relevan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip *digital governance* seperti efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Model ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa, sektor swasta, dan masyarakat yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan desa berbasis teknologi. Integrasi visi dan komitmen antara ketiga aktor ini menjadi dasar yang kuat bagi keberhasilan program digital, memastikan bahwa setiap pihak memiliki tanggung jawab dan kontribusi yang jelas dalam menciptakan desa digital yang berkelanjutan. Bentuk interaksi antaraktor dalam model ini, yang mencakup *networking*, *partnership*, dan *collaboration*, berperan penting dalam mempercepat proses implementasi teknologi dan memastikan keberlanjutan program. Dengan menggunakan integratif *digital governance*, penelitian ini akan menganalisis bagaimana prinsip-prinsip *digital governance* diterapkan melalui kolaborasi antaraktor yang efektif untuk mencapai efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, serta memastikan program Desa Digital dapat berjalan dengan sukses dan berkelanjutan.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana program Desa Digital mengintegrasikan prinsip-prinsip *digital governance* melalui sinergi antaraktor untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan desa.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Manfaat penelitian Bagaimana program Desa Digital mengintegrasikan prinsip-prinsip *digital governance* melalui sinergi antaraktor untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan desa.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur di bidang e-Government, khususnya dalam konteks implementasi digitalisasi di tingkat desa. Studi ini memperkaya pemahaman tentang konsep *Smart Village* dan kolaborasi multi-pihak dalam transformasi digital, yang mencakup peran pemerintah desa, masyarakat, serta sektor swasta. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi teoritis untuk mengembangkan model evaluasi keberhasilan digitalisasi desa, yang mencakup aspek teknologi, literasi digital, dan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini mendukung pengembangan teori dan kerangka kerja yang relevan bagi studi lanjutan di bidang digitalisasi layanan publik, terutama di wilayah pedesaan.

### 1.4.1 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya untuk merancang dan mengimplementasikan program digitalisasi yang lebih efektif dan efisien. Misalnya, temuan penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui aplikasi seperti *MallDesa*, sekaligus mengatasi tantangan seperti kesenjangan digital dan kurangnya literasi teknologi di masyarakat. Selain itu, penelitian ini memberikan rekomendasi konkret untuk membangun kolaborasi yang produktif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mendukung transformasi digital. Dengan mengadopsi strategi yang dikemukakan dalam penelitian ini, pemerintah desa dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, sekaligus memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi.